

KERUSAKAN HUTAN DAN MUNCULNYA GERAKAN KONSERVASI DI LERENG GUNUNG LAMONGAN, KLAKAH 1999-2013

Deforestation and Rise of Environmental Movement at Slope of Mount Lamongan, Klakah 1999-2013

Izzatul Kamilia dan Nawiyanto

Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember

Email: izzati.kamilia@gmail.com

Abstrak

Awal era reformasi, kerusakan hutan akibat penebangan liar banyak terjadi di berbagai tempat. Di Pulau Jawa kerusakan hutan terjadi di kawasan hutan milik Perhutani yang sebagian besar ditanami Pohon Jati. Hal tersebut juga terjadi di kawasan hutan Gunung Lamongan, Klakah. Pelaku penebangan tidak lain adalah masyarakat setempat yang tinggal di sekitar hutan. Pada awal tahun 2000 kondisi Gunung Lamongan gundul tanpa tegakan pohon. Bencana alam seperti banjir dan longsor mulai melanda kawasan sekitar hutan. Bencana kekeringan juga terjadi meski di musim penghujan. Debit air di sumber mata air dan ranu menurun. Kondisi ini mendorong munculnya kesadaran masyarakat yang tinggal di bawah Lamongan untuk melakukan gerakan konservasi guna mengembalikan fungsi hutan Gunung Lamongan yang selama ini menjadi penyangga ekosistem bagi kawasan di bawahnya. Kelompok konservasi bernama Laskar Hijau yang merupakan sebuah gerakan sosial kemudian muncul dan menanam kawasan Gunung Lamongan dengan tanaman buah-buahan. Selain menanam, kelompok ini juga melakukan aksi protes pada pihak pemangku hutan, Perhutani yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini menggabungkan metode sejarah dan sejarah lisan. Metode sejarah digunakan untuk mengkaji bagaimana kerusakan hutan terjadi serta bagaimana muncul dan berkembangnya gerakan konservasi di Gunung Lamongan. Metode sejarah lisan digunakan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjadi saksi atau terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

Kata kunci: kerusakan hutan, konservasi, gerakan sosial, Klakah.

Abstract

Early reform era, the damage of forest due to illegal logging occurred in many places. Java deforestation occurred in the area of Perhutani forest, that the trees are mostly planted with Teak. This also occurred in the forest of Mount Lamongan, Klakah. Logging perpetrator is the local communities that living around the forest. In early 2000, Mount Lamongan conditions without tree stands bare. Natural disaster such as flood and erosion began to hit the area around the forest. Droughts also occur even in the rainy season. Water discharge in springs and Ranu decreased. These condition encourage the awareness of people living below the Mount Lamongan to the conservation movement to restore forest function of Mount Lamongan which has been the buffer ecosystem for the region underneath. Conservation group called the Laskar Hijau is a social movement then emerging area of Mount lamongan and planted with fruit trees. In addition to planting, this group also protested at the forest stakeholders, Perhutani wich are Badan Usaha Milik Negara. This article use combination of historical method and oral history method. The historical method used to explain how deforestation occurs and how it appears in the conservation movement of Mount Lamongan. Oral history method used to obtain information from the community who witness or are involved directly in the incident.

Keywords: deforestation, conservation, social movement, Klakah.

PENDAHULUAN

Hutan adalah sebutan bagi sebuah kawasan luas yang dipadati dengan tumbuh-tumbuhan. Keberadaan hutan sangat penting mengingat kawasan hutan yang memiliki banyak manfaat, mulai dari manfaat ekologis, sosial budaya, dan

juga manfaat ekonomis. Manfaat ekologis hutan dapat dilihat dari fungsi hutan yang menjadi habitat bagi kehidupan liar, pengatur tata air bagi kawasan sekitarnya, pengendali iklim mikro, juga penghasil oksigen. Sedangkan manfaat sosial budaya dapat

dilihat bahwa banyak suku asli Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada hutan. Mulai tinggal berdampingan dengan kawasan hutan hingga menjadikan hutan sebagai pusat dan sumber kehidupan mereka, seperti Suku Dayak Bahau Talivaq yang menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan mereka, mulai dari pemenuhan, pangan, papan, obat-obatan, dan areal kuburan.

Hutan juga memiliki manfaat ekonomis yang tidak kalah penting seperti menghasilkan buah-buahan, obat-obatan, binatang buruan, dan kayu-kayuan. Untuk Indonesia sendiri, sejak tahun 1970-an hasil produksi kayu yang melimpah dari kawasan hutan dimanfaatkan dan diperdagangkan. Dari hasil penebangan kayu log tersebut, pemerintah Indonesia mendapatkan devisa asing terbesar kedua setelah minyak bumi (Hidayat, 2011:2). Pemanfaatan hasil hutan secara besar-besaran berakibat pada rusaknya kawasan hutan Indonesia. Departemen Kehutanan mencatat, pada tahun 2002 terdapat 96,3 juta hektar lahan hutan mengalami degradasi, 54,6 juta hektar yang rusak diantaranya mencakup kawasan hutan lindung, produksi, dan kawasan konservasi (Nawir dkk, 2008:45).

Penyebab terbesar kerusakan hutan Indonesia adalah kegiatan manusia, mulai dari perluasan areal pertanian yang tidak terencana, perluasan areal perkebunan, kebakaran hutan, serta maraknya perambahan hutan dan pembalakan liar. Pembalakan hutan marak terjadi pada masa peralihan dari pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi. Pada kisaran Januari tahun 1997 hingga Juni 2003 berdasarkan pantauan pada media tercatat 359 peristiwa konflik yang berkaitan dengan kehutanan. Jumlah konflik meningkat hampir empat kali lipat pada tahun 1999 jika dibandingkan dengan catatan konflik kehutanan yang terjadi pada tahun 1997, yakni 52 kejadian pada tahun 1999 dan 14 kejadian pada tahun 1997. Dari pantauan media juga diketahui bahwa konflik kehutanan terbesar terjadi pada tahun 2000 dengan 153 konflik kehutanan (Wulan, 2004:8).

Sekurang-kurangnya terdapat lima penyebab utama konflik yang terjadi, yaitu perambahan hutan, pencurian kayu, perusakan lingkungan, tata batas kawasan atau akses, dan alih fungsi kawasan hutan. Khusus perambahan hutan dan pencurian kayu, masing-masing 26% untuk perambahan hutan dan 23% untuk pencurian kayu. Pada masa

peralihan tersebut hingga memasuki awal era reformasi, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar terjadi di berbagai tempat, mulai dari Riau, Pulau Sumatra hingga Pulau Kalimantan. Di Kalimantan pada tahun 1999, *Tempo* mencatat terdapat 1,5 hingga 2 juta hektar hutan yang rusak akibat penjarahan.

Salah satu konflik kehutanan yakni perambahan dan pencurian kayu juga terjadi di kawasan hutan Gunung Lamongan yang terletak di Kecamatan Klakah. Menurut laporan yang ditulis koran ahrian setempat, yakni Radar Lumajang, jumlah luas hutan yang rusak di kawasan gunung Lamongan akibat pembalakan pada tahun 1999, sekitar 6000 hektar. Kerusakan tersebut berdampak pada ekosistem kawasan sekitar hutan, karena selama ini Gunung Lamongan berfungsi sebagai pilar ekosistem bagi kawasan di bawahnya. Kerusakan hutan ini kemudian mendorong sekelompok orang untuk menggagas sebuah gerakan konservasi di kawasan bekas pembalakan di lereng Gunung Lamongan.

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang hendak diangkat dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah awal mula kerusakan kawasan hutan di lereng Gunung Lamongan; (2) Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh rusaknya kawasan hutan di lereng Gunung Lamongan; (3) Bagaimana sikap pemerintah dan kebijakan apa yang dikeluarkan menyikapi kerusakan hutan di Gunung Lamongan; (4) Bagaimanakah proses munculnya gerakan konservasi di lereng Gunung Lamongan; (5) Bagaimanakah respons pemerintah menyikapi munculnya gerakan konservasi di lereng Gunung Lamongan.

Dengan mengkaji permasalahan tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk: (1) Mengungkap penyebab kerusakan hutan di lereng Gunung Lamongan; (2) Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan; (3) Mengetahui sikap dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap kerusakan hutan; (4) Mengkaji munculnya gerakan konservasi di lereng Gunung Lamongan; (5) mengetahui respons pemerintah terhadap munculnya gerakan konservasi di lereng Gunung Lamongan.

Analisis tulisan ini dibangun dengan bantuan Ilmu Sosiologi, utamanya teori tentang gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru merupakan bagian dari gerakan sosial, namun terdapat perbedaan di

beberapa bagian. Seperti aktor yang terlibat, cara pengorganisasian, struktur yang digunakan, serta bentuk gerakannya. Gerakan sosial yang digolongkan pada gerakan sosial baru lebih berkaitan dengan masalah ide atau nilai yang diusung oleh gerakan yang bersangkutan (Triwibowo, 2006:xvi), seperti gerakan feminisme dan gerakan lingkungan tentunya. Sedangkan gerakan sosial lama biasanya adalah gerakan-gerakan sosial yang memfokuskan pada isu yang berkaitan dengan materi seperti gerakan buruh dan gerakan agraria (White, 2004:187).

Dalam kajian ini, Laskar Hijau yang merupakan gerakan konservasi akan dikaji tidak sebagai gerakan lingkungan biasa tapi sebagai gerakan lingkungan dengan paradigma *deep ecology*. Berdasarkan penjelasan Bill Devall, *deep ecology* adalah premis posisi manusia di dalam alam semesta. Manusia tidak boleh merasa berada di atas makhluk hidup lainnya (Situmorang, 2013:69). Selain itu hal mendasar dari *deep ecology* menurut Devall adalah “*Deep ecology* berupaya mempertanyakan premis-premis mendasar paradigma dominan penyebab hancurnya alam daripada mempertanyakan gejala-gejala krisis lingkungan hidup sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi.” (Situmorang, 2013:67-68).

Menurut Devall, paradigma dominan saat ini selalu melihat sumber daya alam sebagai sebuah benda yang hanya bisa dieksploitasi. Tujuan dari eksploitasi itu sendiri dalam paradigma dominan, tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang dilihat dari layak atau tidaknya hunian, pakaian, kendaraan, dan juga perhiasan. Paradigma dominan tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa hal yang mendorong kemunculan paradigma dominan tersebut. Dalam hal ini para pemikir *deep ecology* melihat tiga faktor utama yang mempengaruhi kemunculan paradigma dominan yaitu, ajaran agama (Yahudi, Islam, dan Kristen) yang memposisikan manusia lebih unggul dari makhluk hidup lainnya, adanya ideologi kapitalis yang berkembang, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang digunakan oleh beberapa orang sebagai alat dominasi (Situmorang, 2013:68-69).

Tulisan ini dianggap penting karena dapat memberikan sumabangan terhadap gambaran terjadinya kerusakan lingkungan akibat

pembalakan hutan yang hampir terjadi di seluruh kawasan di Indonesia pada masa transisi dari Orde Baru menuju era reformasi. Selain itu penelitian secara historis tentang gerakan lingkungan juga dapat menambah kajian gerakan sosial utamanya yang berkaitan dengan gerakan lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dihasilkan melalui penelitian sejarah yang prosedurnya mengikuti metode yang berlaku dalam penelitian kajian sejarah, sesuai dengan definisi Garraghan, metode sejarah dibuat untuk memudahkan sejarawan dalam mengumpulkan sumber sejarah atau heuristik, memberikan kritik, dan menyajikan hasilnya yang biasanya disajikan dalam bentuk tulisan (Garraghan, 1957:33).

Metode itu adalah pertama, heuristik yakni pencarian dan pengumpulan sumber atau informasi. Tahap kedua adalah kritik. Dan tahap ketiga adalah menyajikan hasil penelitian yang dibangun dari dua tahapan sebelumnya, heuristik dan kritik, setelah sebelumnya melakukan interpretasi atas sumber yang didapat (Garraghan, 1957:34).

Berkaitan dengan pengumpulan sumber, dalam kajian ini sumber yang akan dikumpulkan adalah sumber lisan ataupun tertulis. Sumber lisan yang akan digunakan sebagai sumber primer adalah kesaksian dari orang-orang yang terlibat atau menyaksikan secara langsung kegiatan yang mengakibatkan rusaknya hutan di lereng Gunung Lamongan. Tidak ketinggalan pula saksi dan pelaku yang ikut terlibat dalam gerakan konservasi. Sumber sekunder juga akan digunakan baik sebagai pembanding, penguat, ataupun verifikasi.

Sumber tertulis yang akan dikumpulkan di antaranya adalah dokumen tertulis baik dokumen resmi dari pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan, ataupun catatan yang didokumentasi oleh masyarakat yang melakukan gerakan konservasi. Sumber tertulis juga akan dikumpulkan dari berita-berita yang ditebitkan oleh berbagai media, baik lokal ataupun nasional, media cetak ataupun media elektronik.

Berkaitan dengan pengumpulan sumber lisan metode yang digunakan adalah sejarah lisan. Sejarah lisan memiliki pengertian sebagai catatan

mengenai suatu tempat, orang atau peristiwa sejarah, kenangan langsung mengenai masa lampau, kisah dari saksi mata. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa itu adalah kenangan yang hidup (Huen, 2000:4).

Penggunaan sumber lisan dalam penelitian ini sangat penting dalam mengungkapkan peristiwa sejarah. Hal itu tidak terlepas dari kajian dalam tulisan ini yang sifatnya kontemporer. Batasan waktu kajian tulisan ini adalah tahun 1999 hingga 2013. Berdasarkan tahun tersebut maka penggunaan sumber lisan dengan melakukan wawancara pada sumber yang terkait sangat mungkin untuk dilakukan. Dari wawancara diharapkan dapat diperoleh informasi langsung dari informan. Pengumpulan sumber sejarah lisan dilakukan melalui teknik wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klakah adalah salah satu kecamatan yang termasuk dalam kawasan Lumajang Utara. Kecamatan dengan luas 83,67 km² ini memiliki sebuah gunung api yang pernah memegang rekor sebagai gunung api dengan jumlah letusan terbanyak di Pulau Jawa pada periode tahun 1799 hingga 1899, dengan jumlah letusan sebanyak 33 kali. Gunung api dengan ketinggian 1651 mdpl ini bernama Gunung Lamongan atau warga setempat menyebutnya dengan sebutan Gunung Lemongan.

Letusan terakhir Gunung Lamongan terjadi pada tanggal 5 Februari 1898 (Matahelumual, 1990:26). Pusat erupsi letusan terakhir memunculkan gundukan baru yang kemudian oleh warga setempat disebut sebagai Gunung Anyar atau Gunung Puji. Pusat erupsi Gunung Lamongan tidak selalu terjadi di puncak gunung karena Gunung Lamongan memiliki 60 pusat erupsi parasitik yang terdiri dari kerucut vulkanik seperti Gunung Anyar dan maar atau ranu, kawah vulkanik yang umumnya berbentuk bundar, memiliki dinding yang terjal, dan lereng yang landai. Dari 27 maar yang ada di sekitar Gunung Lamongan terdapat maar yang terisi air yang dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari dan maar yang tidak terisi air yang juga disebut ranu *wurung*, umumnya ranu *wurung* dimanfaatkan warga sebagai lahan untuk bercocok tanam.

Pada masa kolonial Belanda, kawasan di lereng Gunung Lamongan dimanfaatkan sebagai

area perkebunan kopi. Letusan terakhir Gunung Lamongan pada Februari 1898 merusak tanaman kopi, daun-daun kopi rusak karena terkena panas akibat letusan. Pada tahun 1942, saat Jepang menggantikan Belanda menduduki Indonesia, kawasan yang pernah menjadi kebun kopi telah berubah menjadi hutan liar yang dipenuhi pohon dan semak belukar. Pemerintah Jepang yang ada di Klakah kemudian memerintahkan penduduk yang tidak terkena *romusha* untuk membuka kawasan hutan dan menanaminya dengan pohon jati. Pada masa Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan PP No.4 tahun 1957 yang mengatur pengelolaan hutan yang dikelola secara desentralisasi dengan dibentuknya Dinas Kehutanan Daerah dan Perum Perhutani. Pada Oktober 1961, Perum Perhutani II daerah Jawa Timur dibentuk dan bertanggung jawab atas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di kawasan Jawa Timur. Sejak saat itu pula kawasan hutan di Gunung Lamongan menjadi tanggung jawab Perum Perhutani. Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan umum artinya perusahaan ini seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Habibullah, 2009:75).

Dari dua belas desa yang terletak di Kecamatan Klakah, terdapat dua desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Gunung Lamongan. Dua desa itu adalah Desa Papingan dan Desa Sumber Wringin. Secara turun temurun warga dari dua desa ini hidup berdampingan dengan hutan dan beberapa arga Papingan dan Sumber Wringin menjadikan kawasan hutan sebagai sumber kehidupan mereka.

Sebagian besar warga Papingan dan Sumber Wringin adalah petani dan buruh tani. Petani adalah warga yang memiliki tanah sendiri dan dijadikan sebagai lahan bercocok tanam, sedangkan buruh tani adalah warga yang bercocok tanam tetapi tidak di tanah mereka sendiri. Sebagian besar buruh tani di dua desa ini adalah anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibentuk pada tahun 1981 oleh Perhutani.

Warga yang tergabung dalam KTH dilibatkan langsung oleh Perhutani pada kegiatan pengelolaan hutan di hutan produksi. Keterlibatan anggota KTH dimulai setelah Perhutani melakukan penebangan pohon. Lahan kosong bekas tebangan dibagi-bagikan pada anggota KTH. Setiap anggota

mendapatkan lahan garapan masing-masing seperempat hektar. Setelah lahan bekas tebang dibersihkan, anggota KTH biasanya menanam lahan dengan palawija. Setelah dua hingga tiga kali masa panen, Perhutani memberikan bibit tanaman keras seperti bibit jati. Bibit tersebut ditanam di lahan yang menjadi tanggung jawab anggota KTH. Setelah bibit dari Perhutani ditanam, anggota KTH masih diperkenankan untuk menanam lahan hutan produksi dengan tanaman palawija. Anggota KTH akan berhenti menanam lahan hutan produksi dengan tanaman palawija setelah tanaman milik Perhutani tumbuh tinggi sehingga sinar matahari tidak bisa mengenai tanaman anggota KTH lagi.

Secara umum pembentukan anggota KTH yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar hutan tidak berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Pertama, karena jumlah lahan yang tidak sebanding dengan jumlah warga sekitar hutan, sehingga tidak semua masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh lahan garapan. Kedua, keterbatasan waktu pemanfaatan lahan yang hanya berkisar dua hingga tiga tahun. Ketiga, paradigma pengelolaan sumber daya alam yang dianut pemerintah orde baru. Pemerintah orde baru memandang bahwa sumber daya alam termasuk kayu hasil hutan adalah barang ekonomi yang bisa ditukar dengan devisa (Rosadi, 2012:20), sehingga kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah termasuk pembentukan KTH tetap berpatokan pada cara pandang tersebut yakni *timber growing bussines*.

Kerusakan Hutan dan Respons Pemerintah

Pada masa peralihan antara era orde baru ke era reformasi kasus pembalakan liar terjadi dimana-mana, juga di kawasan hutan Pulau Jawa yang mayoritas ditanami pohon jati. Pohon jati atau *Tectona Grandis* adalah pohon yang kayunya memiliki nilai tinggi karena kekuatan dan keawetannya (Sumarna, 2002:1).

Hutan di Gunung Lamongan juga tidak luput dari incaran para pembalok. Pembalakan hutan di kawasan Lumajang Utara bermula dari Desa Kali Penggung, Kecamatan Randuagung, salah satu desa yang juga berbatasan langsung dengan hutan di kawasan Gunung Lamongan. Setelah tidak ada lagi pohon yang bisa ditebang di kawasan hutan Kali Penggung, pembalakan

merembet ke arah barat, ke daerah Salak dan terus ke barat hingga mencapai kawasan hutan yang termasuk dalam kawasan administratif Desa Sumber Wringin, Kecamatan Klakah.

Medio 1999, di bulan Juni, Kepala Desa Papringan, Joyo Rekso, mendengar kabar bahwa para pembalok tengah bersiap untuk menebangi pohon yang ada di kawasan hutan Desa Papringan. Joyo Rekso yang tidak menghendaki hutan di desanya gundul seperti hutan desa tetangga, mengomandoi langsung sekitar 150 warga Papringan untuk menghadang para pembalok. Masing-masing warga Papringan membawa celurit dan bersiap masuk ke dalam hutan untuk menghadang para pembalok yang tidak hanya memiliki alat untuk menebang kayu, tetapi juga celurit dan petasan.

Sebagai kepala desa, Joyo Rekso memerintahkan salah satu perangkat desa Papringan, Suherman, untuk melapor kepada Muspika Klakah, bahwa warga Papringan tengah bersiap menghadang para pembalok. Setelah mendengar laporan dari aparat desa Papringan, Camat Klakah bersama aparat kepolisian, anggota TNI koramil Klakah, dan mantri hutan berangkat menuju Desa Papringan. Camat Klakah saat itu memiliki kebijakan yang berbeda dengan Joyo Rekso. Camat Klakah meminta Joyo Rekso untuk menarik kembali warganya dan meminta agar tidak ada bentrokan antara warga Papringan dan pihak pembalok. Alasannya, karena Muspika Klakah tidak menginginkan ada bentrokan massa yang kemungkinan dapat menelan korban jiwa. Larangan dari Muspika Klakah tersebut akhirnya menggagalkan warga papringan untuk menghadang para pembalok.

Pada malam harinya, para pembalok mulai bergerak menebangi pohon di tengah hutan Papringan. Pada hari-hari selanjutnya, baik di siang hari ataupun malam hari kegiatan pembalakan tidak pernah berhenti. Aparat kepolisian diterjunkan ke lapangan tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan, seperti yang diungkapkan oleh Joyo Rekso (76 tahun) “ini dari polres diterjunkan, tapi cuma nonton.”

Melihat tidak ada tindakan tegas dari aparat keamanan, warga Papringan yang sebelumnya berusaha menghalang para pembalok juga ikut masuk ke dalam hutan, bergabung dengan pembalok dari Desa Sumber Petung, Salak, dan

Sumber Wringin, menebangi pohon-pohon di dalam hutan. Menurut Suherman keterlibatan warga Papringan yang melakukan penebangan pohon tidak lepas dari anggapan warga Papringan yang merasa berhak atas pohon-pohon di dalam hutan karena ditanam oleh sesepuh mereka, juga rasa tidak rela jika pohon di hutan desa mereka ditebangi oleh warga dari desa tetangga. Lebih lanjut Suherman (42 tahun) mengatakan, “*Lha iki loh segara. Segarane wong Papringan. Mosok wong Papringan gak kimanan iwake.*”

Tidak semua warga Papringan yang masuk ke dalam hutan ikut menebangi pohon secara langsung. Menurut Nikmat (67 tahun), salah seorang warga Papringan dari Dusun Godean, ia dan beberapa warga Godean lainnya hanya memunguti bagian ranting pohon untuk dijadikan kayu bakar. Lain lagi dengan Ilal Hakim (32 tahun), warga Papringan dari dusun Gunung Kenek, ia mengaku tidak menebang pohon di dalam hutan, tetapi ia yang membeli kayu kepada kelompok penebang. “*Saya ndak ikut nebang, cuma saya beli kayunya.*” demikian yang diungkapkan oleh Ilal Hakim.

Tidak hanya Ilal, para pembeli kayu yang langsung masuk ke dalam hutan juga datang dari berbagai tempat, seperti Jember, Probolinggo, Pasuruan, hingga Gresik. Sebagian besar pembeli adalah perusahaan-perusahaan pembuat kapal. Truk-truk pengangkut kayu tidak berhenti melintasi jalan Desa Papringan yang sebelumnya sepi. Ilal mengakui, bahwa dalam 24 jam, ia sendiri bisa mengeluarkan tiga hingga sepuluh truk yang mengangkut gelondongan kayu jati.

Kegiatan pembalakan berjalan tanpa ada hambatan dari aparat keamanan, walaupun setiap hari banyak aparat keamanan yang diturunkan ke lapangan. Aparat keamanan tidak dapat mencegah pembalakan, salah satu faktornya karena banyaknya jumlah pembalak di dalam hutan yang mencapai ribuan. Sesekali tembakan udara terdengar dari dalam hutan, tetapi tidak digubris oleh para pembalak. Faktor lainnya adalah keterlibatan oknum aparat keamanan, baik langsung ataupun tidak. Menurut Ilal, beberapa oknum aparat keamanan yang bertugas di lapangan bekerjasama dengan masing-masing ketua kelompok pembalak. Terjadi kesepakatan tidak tertulis antara aparat keamanan dengan ketua kelompok pembalak yang menguntungkan masing-

masing pihak. Aparat keamanan mendapat bagian dari hasil pembalakan yang dilakukan warga dan para pembalak dapat menebang pohon tanpa ditegur oleh aparat keamanan. Keterlibatan aparat keamanan juga ditemukan oleh pihak Perhutani saat menangkap seorang sopir truk bernama Matsukur pada 29 Juni 1999, yang datang mengambil kayu dari seorang warga Papringan bernama Erfan. Dari keterangan Matsukur diketahui bahwa yang menyuruh Matsukur adalah seorang anggota TNI dari Triwungan, Mayangan, Probolinggo yang bernama Arief.

Pada saat yang sama, yakni di masa transisi antara Orde Baru ke era reformasi, kasus pembalakan hutan juga terjadi di hutan Perhutani lainnya seperti di daerah Kalipare, Malang, Jawa Timur dan Randublatung, Blora Jawa Tengah. Baik di Kalipare ataupun Randublatung, pembalakan secara besar-besaran berawal dari kasus pencurian skala kecil yang dilakukan warga setempat karena desakan ekonomi. Pihak Perhutani baik di Kalipare dan Randublatung melakukan penembakan kepada warga setempat yang mencuri kayu. Kasus penembakan terhadap warga kemudian memicu pembalakan dalam skala besar di kawasan hutan negara.

Persamaan kejadian, alasan, dan faktor pemicu pembalakan dalam skala besar di Kalipare dan Randublatung inilah yang membedakan kasus pembalakan di Klakah dengan daerah lainnya. Bisa dikatakan kasus pembalakan di Kalakh merupakan pembalakan kiriman. Karena pembalakan di Klakah merupakan pembalakan lanjutan dari pembalakan yang berasal dari kawasan hutan Kali Penggung. Sebagian besar pelaku pembalakannya pun warga kali Penggung dan Salak. Sementara warga setempat, yakni warga Papringan berusaha menghalangi pembalakan, walau pada akhirnya sebagian warga papringan turut masuk ke dalam hutan dan ikut menebangi pohon dengan alasan merasa berhak atas pohon di dalam hutan karena ditanam oleh nenek moyang mereka dan tidak rela jika yang menebang adalah warga desa tetangga.

Pembalakan di kawasan hutan Papringan secara besar-besaran hanya terjadi dalam empat bulan dan hanya menyisakan sekitar dua puluh tegakan pohon jati di sekitar kawasan Sumber Kolbek, salah satu mata air yang menjadi tumpuan hajat warga Papringan. Hal itu membuat daerah Papringan mulai dilanda banjir setiap musim

penghujan datang. Meskipun demikian banjir tidak mengenai satu pun rumah penduduk. Seperti yang dikatakan oleh Muhlisin (28 tahun), aliran air melewati jurang yang terletak di pinggir perkampungan, "*benjireh lebet cora.*" [banjirnya lewat jurang]. Banjir yang menerjang Papringan di awal abad ke-21 merusak fasilitas umum seperti jalan dan jembatan. Beberapa tanaman kopi milik warga yang terletak di sebelah selatan Gunung Lamongan tertutup oleh pasir yang dibawa air hujan dari lereng Gunung Lamongan. Menurut Richard Weyl, kegiatan menebang pohon di hutan pasti akan berpengaruh pada kondisi persediaan air di kawasan sekitar hutan (Weyl, 1998:80). Hilangnya tegakan pohon di hutan Gunung Lamongan berdampak pada menurunnya debit air di beberapa mata air yang terletak di bawah Gunung Lamongan, seperti di Sumber Kolbek, Ranu Klakah, Ranu Lading dan di mata air lainnya.

Menurunnya debit air seperti di Ranu Klakah yang menurun hingga empat meter dari ketinggian normal sebelum pembalakan mengancam bisnis keramba yang dibudidayakan di Ranu Klakah oleh warga setempat. Selain itu pasokan air untuk irigasi persawahan juga akan menurun dan dapat berakibat pada menurunnya hasil panen para petani.

Saat terjadinya pembalakan pegawai Perhutani hanya mengawasi kegiatan pembalakan dan tidak dapat mencegah terjadinya pembalakan. Hal itu dilakukan karena jumlah petugas Perhutani tidak sebanding dengan jumlah pembalakan yang ada di dalam hutan. Setelah pembalakan usai dan kawasan hutan mulai ditinggalkan oleh para pembalakan, pihak Perhutani Klakah mulai mendatangi kawasan bekas pembalakan. Pada tahun 2000, lahan bekas pembalakan dibagi-bagikan kepada anggota KTH dan Perhutani mulai merencanakan pemulihan kawasan hutan dengan melakukan penanaman kembali di lahan gundul bekas pembalakan.

Pada tahun 2001, berkembang sebuah paradigma baru tentang pengelolaan hutan yang kemudian melahirkan sebuah kebijakan baru mengenai pengelolaan hutan yang disebut *social forestry*. Kebijakan ini menekankan peran utama masyarakat dalam pengelolaan hutan (Utama, 2006:12). Di tahun yang sama Perhutani mengeluarkan Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang

PHBM atau Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. PHBM memiliki tujuan agar masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat turut aktif menjaga kelestarian hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan diberikannya kesempatan untuk bertani di kawasan hutan melalui sistem bagi hasil sumber daya hutan.

Masyarakat yang terlibat dalam program PHBM tergabung dalam sebuah kelompok bernama LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan. LMDH di Desa Papringan dan Sumber Wringin baru terbentuk pada 30 Juni 2006 dan yang menjadi ketua LMDH di masing-masing desa adalah kepala desa setempat. Jika sebelum LMDH terdapat KTH yang anggotanya menanami lahan hutan dengan tanaman palawija, 34 orang anggota LMDH Desa Papringan yang diberi tanggung jawab mengelola 276,80 hektar tanah hutan menanami lahan tersebut dengan pohon sengon.

Pemulihan kondisi hutan yang dilakukan perhutani melalui LMDH dalam program PHBM lebih bisa dinilai sebagai pemulihan fungsi ekonomis hutan dari pada pemulihan fungsi ekologis. Karena, tujuan akhir dari penanaman semua pohon di kawasan hutan adalah untuk ditebang di kemudian hari dan menghasilkan keuntungan bagi Perhutani.

Benih-benih Gerakan Konservasi

Di Desa Tegalrandu yang berbatasan langsung dengan Desa Papringan, terdapat seorang warga bernama Matruki yang memiliki kebiasaan menanam pohon sejak tahun 1970. Selain seorang mantan Kepala Desa Tegalrandu, Matruki juga dikenal sebagai seorang guru ngaji. Ada lebih 60 anak yang mengaji di langgar Matruki. Pada tahun 2005, Matruki bersama seorang pemuda asal Desa Klakah menggagas sebuah kegiatan belajar alternatif untuk anak didik Matruki yang diberinama Sekolah Rakyat Merdeka (SRM).

Menurut Matruki, dibentuknya SRM adalah sebuah upaya untuk menyalakan kreativitas anak-anak. Hal itu dapat dilihat dari materi yang cukup beragam yang diberikan kepada anak-anak SRM, seperti materi kesenian, baik seni pertunjukan ataupun kerajinan tangan dan materi mengenai penghijauan. Anak-anak SRM dilatih cara membibit tanaman menggunakan biji yang mereka

bawa dari rumah, sehingga menjadi bibit siap tanam.

Kegiatan belajar di SRM kemudian melahirkan sebuah gagasan kegiatan baru yang isinya untuk menampilkan karya anak-anak SRM yang telah belajar selama satu tahun. Maka di tahun 2006 lahirlah sebuah kegiatan bernama Maulid Hijau. Maulid Hijau adalah kegiatan perayaan Maulid Nabi yang digabungkan dengan penghijauan. Perayaan Maulid Nabi dilaksanakan pada malam hari yang dikemas dalam bentuk pementasan karya seni anak-anak SRM dan dilanjutkan dengan pengajian. Pada pagi harinya kegiatan maulid Hijau dilanjutkan dengan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitar Ranu Klakah.

Pada tahun 2007, Maulid Hijau diselenggarakan untuk kedua kalinya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan Maulid Hijau pada tahun 2007 ini dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 20 April 2007 hingga 22 April 2007. Selain menampilkan karya seni anak-anak SRM, pengajian, dan penghijauan, Maulid Hijau tahun 2007 juga diramaikan dengan pagelaran pasar rakyat, lomba-lomba, dan juga penyelenggaraan Slametan Desa dengan melarung sesajen ke tengah Ranu Klakah. Kegiatan Maulid Hijau pada tahun 2007 ini pun mendapat dukungan dan dibuka langsung oleh Bupati Lumajang saat itu, Achmad Fauzi.

Pada 3 Januari 2008, saat panitia Maulid Hijau tengah mempersiapkan kegiatan Maulid Hijau untuk ketiga kalinya, sebuah surat fatwa sesat datang dari MUI Klakah yang ditujukan kepada panitia penyelenggara Maulid Hijau. Isi surat itu menyatakan bahwa kegiatan Maulid Hijau adalah kegiatan yang sesat karena mengandung tiga dari sepuluh indikasi aliran sesat menurut MUI, yaitu meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil Syar'ī, mengingkari autentisitas Al-Qur'an, dan menghina, melecehkan, dan atau merendahkan Nabi dan Rasul.

Panitia Maulid Hijau mengirimkan surat balasan kepada MUI Klakah yang berisi permintaan panitia Maulid Hijau kepada MUI Klakah untuk segera menarik kembali fatwa sesat yang dikeluarkan MUI Klakah dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Klakah, khususnya masyarakat Tegalrandu. Surat balasan

dari panita Maulid Hijau ini tidak lepas dari aturan dalam MUI bahwa yang berhak mengeluarkan fatwa sesat adalah MUI pusat yang berkedudukan di Jakarta atau MUI tingkat provinsi setelah sebelumnya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan MUI pusat.

Persoalan fatwa sesat ini kemudian berlanjut menjadi kasus yang ditangani pihak kepolisian. Karena tidak ada titik temu antara MUI Klakah dan panitia Maulid Hijau, pihak kepolisian dan pemerintah daerah Lumajang menghentikan penyelidikan kasus fatwa sesat ini dan di-peti eskan. Sementara itu, tidak peduli dengan fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI Klakah, penyelenggaraan Maulid Hijau yang ketiga tetap berjalan bahkan lebih banyak pihak yang turut mengikuti kegiatan Maulid Hijau.

Setelah penyelenggaraan kegiatan Maulid Hijau, pada april 2008, orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan Maulid Hijau menyadari bahwa untuk menjaga sumber mata air yang debitnya terus menurun di Ranu Klakah, penghijauan tidak cukup dilakukan di kawasan sekitar ranu saja. Penghijauan juga perlu dilakukan di kawasan hutan Gunung Lamongan yang gundul akibat pembalakan besar-besaran yang terjadi sejak pertengahan tahun 1999. Ide tersebut kemudian dibahas secara serius dan melahirkan sebuah kelompok gerakan penghijauan yang diberi nama Laskar Hijau.

Munculnya Gerakan Konservasi yang Menanam di Lereng Lamongan

Pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2008, sebuah gerakan konservasi bernama Laskar Hijau resmi dieklarasikan. Pendeklarasian Laskar Hijau diikuti oleh 300 orang peserta dan dilakukan di padepokan Mbah Citro, rumah seorang penduduk Papringan yang lokasinya berada di tengah-tengah hutan antara hutan produksi dan hutan lindung. Setelah acara pendeklarasian resmi dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon pertama Laskar Hijau di kawasan hutan.

Satu minggu setelah pendeklarasian, relawan Laskar Hijau yang datang melakukan penghijauan menurun drastis, dari 300 orang relawan yang hadir pada hari pendeklarasian, hanya 25 orang yang datang kembali. Memasuki minggu ketiga dan keempatnya ada satu relawan yang

melakukan penghijauan, orang tersebut adalah A'ak Abdullah Al-Kudus. Memasuki minggu kelima sejak dideklarasikan, sekelompok pemuda Desa Klakah yang biasa menaiki Gunung Lamongan, bergabung dalam Laskar Hijau dan melakukan penghijauan di kawasan Gunung Lamongan bersama A'ak.

Dalam definisi gerakan sosial, gerakan sosial digambarkan oleh Tourine sebagai aksi kolektif yang melibatkan diri dalam konflik sosial mengenai pengorganisasian sosial atas orientasi-orientasi kultural penting dalam suatu masyarakat, sementara Blumer menggambarkan sebagai upaya kolektif untuk mendorong terwujudnya kehidupan yang baru (Ma'arif, 2010:50-90). Dua definisi tersebut menggambarkan gerakan sosial sebagai suatu aksi kolektif, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh sekelompok orang.

Sebagai sebuah aksi kolektif Laskar Hijau menyadari bahwa usaha penghijauan membutuhkan dukungan dari lebih banyak pihak, terutama dari masyarakat desa sekitar hutan. Sebagai usaha menarik dukungan dari masyarakat, Laskar Hijau melakukan beberapa kegiatan selain penanaman yang dilakukan setiap hari minggu. kegiatan-kegiatan itu di antaranya adalah, pada tahun 2009 Laskar Hijau mengadakan pengobatan akupunktur keliling dengan mendatangi desa-desa yang ada di sekitar hutan. Setiap desa didatangi satu kali setiap minggunya. Warga yang datang berobat tidak dipungut biaya berupa uang, melainkan dengan memberikan biji-bijian pada Laskar Hijau. Laskar Hijau juga mengadakan pemutaran film yang juga dilakukan dengan cara berkeliling di desa-desa sekitar hutan, kegiatan pemutaran film ini biasa dilaksanakan saat memasuki musim kemarau.

Kegiatan yang dilakukan Laskar Hijau menarik perhatian media, baik media cetak dan nasional. Dari liputan media tersebut banyak relawan bergabung dengan Laskar Hijau yang datang dari luar wilayah Klakah. Latar belakang para relawan pun berbeda-beda, ada yang sehari-harinya petani, ada pula yang datang dari lingkungan akademisi. Kondisi ini sesuai dengan analisis Enrique Larana, Hank Johnston, dan Joseph R. Gusfield mengenai gerakan sosial baru bahwa, basis gerakan sosial baru bersifat lintas kelas dan cenderung mentransedensikan struktur kelas di mana latar belakang status sosial tersebar serta gerakan sosial baru juga dapat melintasi

sekat-sekat wilayah, bahkan batas negara (Ma'arif, 2010:96-97).

Semua kegiatan Laskar Hijau merupakan cerminan dari visi Laskar Hijau yaitu mengembalikan ekosistem Gunung Lamongan dalam bentuk penghijauan dengan konsep hutan setaman. Konsep hutan setaman adalah sebuah konsep yang menggambarkan tentang kawasan hutan yang ditanami oleh berbagai jenis tanaman, utamanya tanaman buah-buahan. Konsep serupa juga pernah dijumpai pada upaya konservasi di India kuno pada masa pemerintahan Dinasti Maurya yang didirikan oleh Chandragupta Maurya. Salah satu raja dinasti Maurya, Asoka, yang merupakan cucu dari pendiri Dinasti Maurya pernah menaklukkan Kerajaan Kalingga melalui peperangan yang menewaskan ribuan orang dan merusak lingkungan alam. Setelah peperangan tersebut, Asoka, melakukan sebuah tindakan pemeliharaan dan perlindungan pada sumber daya alam hayati, salah satunya dengan menanam jalan-jalan di wilayah kerajaannya dengan pepohonan yang kemudian hari bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kerajaan Maurya (Wallbank, 1963:40). Sementara itu, bagi A'ak sendiri konsep hutan setaman ia dasarkan pada ajaran agama Islam yang ia anut. Menurut A'ak (40 tahun), dengan menanai kawasan hutan dengan tanaman memiliki nilai ibadah, karena dari pohon buah-buahan yang di tanam bisa dimakan oleh semua makhluk hidup, mulai dari manusia hingga binatang dalam hutan.

Selain visi, Laskar Hijau juga memiliki empat misi, yaitu pertama, menghijaukan kembali area hutan lindung di Gunung Lamongan. Kedua, melestarikan Gunung Lamongan sebagai pilar ekosistem. Ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan tanpa harus menebang pepohonan. Keempat, mempengaruhi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Laskar Hijau melakukan penanaman di kawasan hutan Gunung Lamongan secara rutin setiap hari minggu. Jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman buah-buahan dan jenis bambu. Pemilihan aneka tanaman buah-buahan didasarkan pada konsep hutan setaman yang diusung Laskar Hijau. Konsep tersebut dinilai bisa menjaga kelestarian hutan dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa harus menebang pohon, karena dengan menanam tanaman buah-buahan yang bisa

dimanfaatkan oleh masyarakat adalah buahnya bukan kayunya, sehingga menghindari terjadinya penebangan.

Jenis bambu yang dipilih Laskar Hijau adalah bambu petung. Pemilihan bambu petung didasarkan pada kondisi tanah di kawasan hutan lindung. Hutan lindung di Gunung Lamongan terdiri dari batu berpasir yang kawasannya hanya ditumbuhi tumbuhan ilalang. Bambu petung dipilih karena bambu merupakan tanaman jenis ilalang, sehingga kemungkinan untuk tumbuh di kawasan hutan lindung lebih tinggi dari pada tanaman lainnya. Selain itu juga pemilihan bambu petung dinilai bisa membantu memulihkan fungsi Gunung Lamongan sebagai pilar ekosistem kawasan di bawahnya, utamanya untuk menjaga debit air yang tersebar di sekitar kawasan Gunung Lamongan. Hal itu karena bambu adalah jenis tanaman yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyimpan air dan bambu petung khususnya adalah jenis bambu yang kemampuan menyimpan airnya lebih tinggi dari pada tanaman jenis bambu lainnya. satu rumpun bambu petung dapat menyimpan air hingga 0.8 m³ atau 800 liter dan juga dapat menghasilkan oksigen hingga 85%.

Gerakan lingkungan yang diusung Laskar Hijau bukanlah gerakan lingkungan biasa yang bergerak di bidang pelestarian dan menginginkan negara untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kondisi lingkungan. Gerakan yang diusung Laskar Hijau adalah sebuah gerakan *deep ecology*, sebuah gerakan yang melihat manusia sebagai bagian integral dari alam, bukan melihat manusia sebagai makhluk yang dapat mengontrol alam serta memperlihatkan hubungan manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain (Situmorang, 2013:73-75).

Dari lima belas tema besar yang dirumuskan Devall berkenaan dengan hal yang bisa dilihat dalam sebuah gerakan *deep ecology*, terdapat beberapa tema besar yang juga dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan Laskar Hijau. Pertama, gerakan *deep ecology* meminta perubahan mental dan psikologi dalam melihat hubungan antara alam dan manusia. Psikologi ini menuntut manusia untuk menghormati makhluk hidup lain dan membiarkannya memiliki kehidupan yang sejajar dengan manusia (Situmorang, 2013:75). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana para relawan Laskar

Hijau memperlakukan alam seperti melarang perburuan dan penebangan.

Kedua, gerakan *deep ecology* menghendaki masalah lingkungan seperti degradasi hutan dipecahkan secara menyeluruh dan juga berpendapat isu ekonomi harus menjadi bagian dari paradigma ekologi (Situmorang, 2013:73). Ketiga, gerakan *deep ecology* mendorong perkembangan semua makhluk hidup berjalan secara alamiah tanpa ada upaya intervensi dari manusia. Gerakan *deep ecology* juga memperingatkan bahwa eksploitasi berlebihan terhadap makhluk hidup dapat merugikan manusia (Situmorang, 2013:73) Dalam Laskar Hijau hal ini tercermin dari pilihan tanaman yang ditanam di lereng Lamongan. Pemilihan tanaman buah-buahan yang juga memiliki nilai ekonomis mencegah terjadinya kembali pembalakan liar seperti yang pernah terjadi pada tahun 1999, karena yang bisa dimanfaatkan buahnya bukan kayunya. Dan terbukti, bahwa pembalakan pada tahun 1999 tersebut memberi dampak negatif seperti menurunnya debit air di beberapa sumber mata air.

Respons Perhutani atas Kehadiran Gerakan Konservasi

Pada tahun 2011, Laskar Hijau dengan pihak Perhutani mengadakan sebuah diskusi dengan tema “Membangun Kerjasama Strategis dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Gunung Lamongan.” Diskusi tersebut dihadiri oleh relawan Laskar Hijau dan beberapa pegawai Perhutani, mulai pegawai Perhutani dari Perum Perhutani II Jawa Timur, Administratur Perhutani KPH Probolinggo, KSKPH Lumajang, Asper Perhutani BKPH Klakah, dan difasilitasi oleh sebuah Lembaga Bantuan Hukum dari Surabaya.

Diskusi tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan kerjasama antara Perhutani dan Laskar Hijau. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam draft perjanjian kerjasama yang harus dibubuhi tanda tangan dari kedua belah pihak. Isi dari perjanjian kerja sama tersebut adalah, pelimpahan hak konservasi dari Perhutani kepada Laskar Hijau dengan kegiatan pengayaan tegakan pohon di kawasan hutan lindung dengan tanaman buah-buahan. Sementara itu, pihak Perhutani bertanggungjawab dengan pengadaan sumber daya rehabilitasi. Pola yang ditetapkan dalam kerjasama tersebut adalah pengelolaan dan

konservasi serta berbentuk kerjasama *non sharing*. Lokasi yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini adalah area kawasan hutan lindung di petak 12 dan 19. Namun, perjanjian ini tidak segera ditandatangani oleh pihak Perhutani hingga tahun 2013.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan Laskar Hijau dengan Perhutani juga menunjukkan salah satu ciri bahwa Laskar Hijau merupakan gerakan *deep ecology*, yakni gerakan *deep ecology* mensyaratkan sebuah kawasan cukup luas sebagai kawasan tanpa eksploitasi. Hal ini telah jelas dilakukan secara serius oleh Laskar Hijau dengan mengadakan perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Perhutani mengenai kawasan konservasi di Gunung Lamongan. Walaupun demikian, A'ak mengatakan bahwa Laskar Hijau tidak membuat target apapun ke depan, misalnya mengenai kondisi Gunung Lamongan sebagai kawasan konservasi tanpa gangguan atau capaian apapun yang harus dicapai Laskar Hijau sebagai sebuah gerakan sosial, mengingat kawasan Gunung Lamongan adalah gunung api aktif yang bisa meletus kapan saja. A'ak kemudian mengatakan, "bisa jadi semua orang mungkin sudah sadar, tidak merusak, terus tiba-tiba Lemongan meledak, *blarr*. Habis. Mau gimana?"

Hal yang kemudian menjadi tantangan dari gerakan konservasi ini bukanlah letusan Gunung Lamongan, tetapi kebakaran hutan yang sering terjadi di Gunung Lamongan, utamanya saat memasuki musim kemarau. Kebakaran terakhir yang terjadi pada bulan Oktober 2013. Pertama kebakaran yang terjadi pada 2 Oktober 2013, kebakaran ini terjadi bukan karena faktor alam atau kecerobohan warga sekitar hutan yang membakar sisa bekas pembersihan lahan tetapi pembakaran bekas tebangan yang dilakukan Perhutani. Kedua kebakaran hutan pada 5 Oktober yang belum yang diketahui penyebabnya.

Kebakaran pada bulan Oktober 2013 ini berawal dari penebangan pohon akasia yang dilakukan Perhutani di petak 19c. Setelah penebangan dilakukan juga dilakukan pembakaran pada bekas tebangan. Kegiatan penebangan pohon yang diikuti dengan pembakaran bekas tebangan merusak banyak tanaman konservasi. Kebakaran kembali terjadi pada tanggal 5 Oktober 2013 sekitar pukul sepuluh pagi. Kebakaran ini terjadi di kawasan hutan lindung. Kebakaran terjadi setelah ada

rombongan pihak Perhutani yang melakukan pemasangan patok di sekitar posko Laskar Hijau.

Kebakaran pada bulan Oktober ini membuat relawan Laskar Hijau melakukan aksi protes kolektif yang dilakukan di halaman kantor Perhutani Lumajang. Dalam aksi protes tersebut Laskar Hijau menyampaikan tuntutan pada pihak Perhutani. Tuntutan yang disampaikan adalah meminta Perhutani untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat atas tindakannya merusak dan membakar tanaman konservasi di Gunung Lamongan, permintaan maaf dapat disampaikan menggunakan media massa. Perhutani hendaknya juga memberhentikan dengan tidak hormat oknum Perhutani yang paling bertanggung jawab atas kerusakan tanaman konservasi di Gunung Lamongan. Perhutani juga diminta untuk mengganti tanaman konservasi yang rusak sebanyak sepuluh kali lipat. Laskar Hijau juga meminta Perhutani untuk segera melakukan tindakan penyelamatan lingkungan dan pengamanan hutan lindung dari penambangan batu dan pasir serta penyelamatan dan pengamanan mata air dengan cara menanam bambu di sekitar mata air. Tuntutan lainnya yang diminta oleh Laskar Hijau adalah agar supaya Perhutani segera menandatangani draft perjanjian kerja sama yang telah disepakati pada 2011 silam.

SIMPULAN

Memasuki era reformasi, kerusakan hutan terjadi dimana-mana. Penjarahan kayu hutan, penebangan liar, hingga kebakaran hutan. Di Pulau Jawa, kerusakan hutan terjadi di kawasan hutan milik Perhutani yang sebagian besar ditanami pohon Jati. Hutan di kawasan Gunung Lamongan juga tidak luput dari aksi pengrusakan. Medio 1999, kelompok pembalakan liar memasuki kawasan hutan Gunung Lamongan yang berada di Desa Papingan. Warga desa yang tidak ingin kawasan hutannya rusak berusaha untuk mencegah pembalakan. Namun, usaha pencegahan urung dilakukan karena pihak Muspika dari kecamatan mencegah terjadinya peristiwa yang lebih besar yang kemungkinan akan menelan korban jiwa.

Pasca pembalakan liar, bencana mulai menimpa kawasan sekitar hutan. Banjir mulai menerjang Papingan dan merusak fasilitas umum seperti jembatan dan jalan. Debit air di beberapa sumber mata air dan ranu yang menjadi tumpuan

kebutuhan air warga menurun. Pihak Perhutani yang merupakan lembaga pemangku hutan berusaha memperbaiki kerusakan hutan dengan menanam kembali kawasan hutan dengan tanaman produksi seperti mahoni dan akasia. Perhutani juga membuat sebuah program yang diberinama PHBM yang bekerjasama dengan masyarakat desa sekitar hutan yang tergabung dalam LMDH. Program ini memiliki tujuan dengan dikelolanya hutan bersama masyarakat kasus pembalakan liar yang merusak kawasan hutan seperti yang terjadi pada tahun 1999 tidak terjadi kembali.

Di sisi lain, kondisi Gunung Lamongan yang gundul melahirkan sebuah gagasan konservasi dari masyarakat setempat untuk memulihkan kondisi hutan Gunung Lamongan. Gagasan ini muncul dalam bentuk sebuah kelompok konservasi bernama Laskar Hijau yang lahir pada 28 Desember 2008. Laskar Hijau adalah kelompok konservasi yang berdiri dengan dukungan suara masyarakat lokal serta tidak memiliki hubungan dengan partai politik manapun. Anggota Laskar Hijau datang dari berbagai kelompok masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Mulai dari masyarakat lokal yang umumnya petani hingga anggota yang berdomisili di luar Klakah dengan berbagai macam latar belakang pendidikan serta pekerjaan.

Kelompok ini digagas oleh seorang warga Klakah bernama A'ak Abdullah Al-Kudus. Bersama warga Klakah lainnya yang bergabung dalam Laskar Hijau A'ak kemudian melakukan usaha penghijauan dengan konsep hutan setaman di lereng Lamongan. Tanaman yang dipilih adalah tanaman jenis buah-buahan. Hal ini tidak lepas dari keinginan Laskar Hijau yang menginginkan agar pembalakan hutan yang pernah terjadi pada tahun 1999 hingga 2000 tidak terulang kembali. Karena dengan menanam tanaman buah-buahan, maka kayunya tidak menarik para pembalak untuk menebangnya, juga agar masyarakat yang tinggal di kawasan hutan bisa mengkonsumsi buah-buahan tersebut.

Keberadaan Laskar Hijau juga mendapatkan tanggapan positif dari Perhutani, BUMN yang merupakan pemangku kawasan hutan di Gunung Lamongan. Pada tahun 2011 pihak Perhutani dan Laskar Hijau melakukan perjanjian kerjasama yang berisi pelimpahan usaha konservasi di

kawasan hutan lindung pada petak 12 dan petak 19 pada Laskar Hijau.

Pada Oktober 2013. Sejumlah tanaman konservasi rusak akibat penebangan pohon Akasia yang dilakukan oleh Perhutani. Pembakaran pada sisa penebangan pohon pun merusak tanaman konservasi. Kejadian tersebut memicu kemarahan relawan Laskar Hijau yang kemudian melakukan aksi demonstrasi pada pihak Perhutani di Lumajang.

Dalam aksi demonstrasi tersebut Laskar Hijau menuntut Perhutani untuk meminta maaf atas perusakan tanaman konservasi yang dilakukan saat penebangan pohon Akasia. Perhutani juga dituntut untuk mengganti sepuluh kali lipat tanaman yang rusak, memberhentikan dengan tidak hormat oknum Perhutani yang paling bertanggung jawab atas kerusakan tanaman konservasi. Perhutani juga diminta untuk segera melakukan tindakan penyelamatan lingkungan di kawasan hutan lindung dari tindakan penambangan batu dan pasir dan melakukan tindakan penyelamatan pada mata air dengan menanam jenis bambu di sekitar lokasi mata air.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus. *Pola-Pola Gerakan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Agger, Ben. *Teori Sosial Kritis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Aryadi, Mahrus. *Hutan Rakyat, Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat*. Malang: UMM Press, 2012.
- Bappeda dan BPS Kabupaten Lumajang. *Kecamatan Klakah Dalam Angka*. 2010.
- BPBD Lumajang. *Buku Profil Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lumajang Tahun 2012*. 2012.
- Budiono, Arief. "Kebijakan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Saradan dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat" dalam *Tesis program magister Universitas Sebelas Maret*, 2008.
- Dinas Kehutanan Lumajang. *Kehutanan Dalam Angka Kabupaten Lumajang Tahun 2012*.

- Garraghan, Gilbert J. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press, 1957.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Habibullah, A. *Kebijakan Privatisasi BUMN*. Malang: Averrous, 2009.
- Hidayat, Mansur. *Arya Wiraraja dan Lamajang Tigang Juru*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2013.
- Handayani, Retno Any. "Analisis Biaya dan Pendapatan Serta Prospek Pengembangan Budidaya Ikan dalam Keramba Jaring Apung di Desa Tegallandu" *Skripsi* pada Jurusan Sosial-Ekonomi Pertanian, Universitas Jember, 2010.
- Hidayat, Herman. *Politik Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Huen, P. Lim Pui, James H. Morrison, dan Kwa Chong Guan (Editor). *Sejarah Lisan di Asia Tenggara Teori dan Metode*. Jakarta: LP3ES, 2000.
- Kementerian Kehutanan. *Ringkasan Review Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Mata Air di Kabupaten Lumajang*. Bekasi: PT. Inti Makmur, 2013.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Ma'arif, Syamsul. *Bahan Ajar Sosiologi: Perilaku Kolektif & Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Gress Publishing, 2010.
- Margana, Sri dan Widya Fitrianiingsih (Editor). *Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global*. Yogyakarta: Ombak, 2010.
- Matahelumual, J. "Gunung Lamongan," *Berita Berkala Vulkanologi*. Edisi khusus no. 125, 1990.
- Mawardi, Ikhwandin dan Sudaryono, "Konservasi Hutan dan Lahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan," dalam *J. Tek. Ling.* Vol. 7, 2006.
- McCarthy, John F. 'Wild Logging': *The Rise and Fall of Logging Networks and Biodiversity Conservation Projects on Sumatra's Rainforest Frontier*. Bogor: CIFOR, 2000.
- Nawir, Ani Adiwinata, Lukas Rumboko dan Murniati (Editor). *Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih dari Tiga Dasawarsa*. Bogor: CIFOR, 2008.
- Nawiyanto. *Pengantar Sejarah Lingkungan*. Jember: Jember University Press, 2012.
- _____. "Bencana dan Pelestarian Lingkungan: Pandangan Etnik Jawa dan Madura di Wilayah Ujung Timur Jawa" dalam *Paramita*, Vol. 22, 2012.
- _____. "Gerakan Lingkungan di Jawa Masa Kolonial" dalam *Paramita*, Vol. 24, 2014.
- Pranowo, Handojo Adi D.S. *Manusia dan Hutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Renier, G. J. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Rohmawati, Iis. "Penjarahan Hutan di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Tahun 1998-2001" *Skripsi* pada Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Jember, 2009.
- Rosadi, Otong. *Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Santoso, Budhy. "Memahami Akar Masalah Konflik Lingkungan pada kasus Penjarahan Hutan," dalam *Jurnal Sosial-Budaya Politik*, volume 2, nomor 1, November 2002.
- Sctompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada, 2005.
- Situmorang, Abdul Wahib. *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia (1968-2011)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- _____. *Gerakan Sosial: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Steinlin, Hansjurg (Penyunting). *Menuju Kelestarian Hutan*. Jakarta: Yayasan Obor, 1988.
- Subadi. *Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Madiun, 2005.
- Sumarna, Yana. *Budi Daya Jati*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2002.

- Sutaryono. *Pemberdayaan Setengah Hati, Subordinasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta: Laperapustaka Utama, 2008.
- Triwibowo, Darmawan (Editor). *Gerakan Sosial, Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Turner, Bryan S. (Editor). *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Utama, Suwignyo. "Orientasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan" dalam *Majalah Planologi*. No. 4, 2006.
- White, Rob (Editor). *Controversies in Environmental Sociology*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Wulan, Yuliana Cahya dkk. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia tahun 1997-2003*. CIFOR: Jakarta, 2004.

